BAB 1

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum. Hal ini berarti bahwa Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, yang dimana kedaulatan Negara di tangan rakyat sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yaitu “kedaulatan Negara berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang”. Semua warga Negara Indonesia sama kedudukannya di mata hukum, berhak mengembangkan diri, mendapatkan pendidikan, mempertahankan hidup dan kehidupannya sesuai dengan pasal 28A-28J UUD 1945. Pasal 28A-28J UUD 1945 diantaranya berisikan mengenai setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, berhak membentuk keluarga yang sah, mengembangkan diri, memperoleh pendidikan, jaminan keselamatan, hak milik pribadi. Salah satu bidang hukum yang sangat terkait dengan penanggulangan kejahatan adalah hukum pidana. Hukum pidana mengenal asas kesalahan, yakni tidak dipidana tanpa adanya kesalahan. Kesalahan merupakan salah satu unsur fundamental dan harus dipenuhi agar subyek hukum dapat dijatuhi hukuman. Menurut para pakar, kesalahan memiliki beberapa unsur. Unsur-unsur yang dimaksud yaitu:¹

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal,
2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*),
3. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

¹ Teguh, Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 95

Bentuk kesalahan pada umumnya adalah kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Kesengajaan dalam bahasa Belanda disebut *opzet* dan menurut M.v.T (*Memories Van Toelichting*), yaitu: “*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui*”. Melalui pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: “*menghendaki dan mengetahui*” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi, dapat dikatakan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Sathochid Kartanegara, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “*seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (willen) akan akibat dari perbuatan itu.*”² Kehendak itu ditujukan kepada: 1) Perbuatan yang dilarang; 2) Akibat yang dilarang; 3) Keadaan yang merupakan unsur tindak pidana.³ Kesengajaan yang hanya ditujukan kepada perbuatannya yang dilarang disebut kesengajaan formal, sedangkan yang diutujukan kepada akibatnya adalah kesengajaan material.⁴

Salah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP, yakni tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351-361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Penganiayaan terjadi karena adanya kealpaan dan kesengajaan. Penganiayaan yang didasarkan pada kesengajaan diatur dalam Pasal 351-355 KUHP, sedangkan penganiayaan karena kealpaan diatur dalam Pasal 359-360 KUHP.

Berdasarkan Pasal 351 KUHP, maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan:

1. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*, h. 96

2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun.
3. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun.
4. Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan.

Adapun unsur-unsur penganiayaan dalam Pasal 351, yakni: 1) Adanya kesengajaan; 2) Adanya perbuatan; 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh; 4) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.⁵

Pasal yang mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan karena kealpaan diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP. Pasal 359 KUHP menyatakan sebagai berikut: Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun. Sedangkan pasal 360 KUHP, yaitu: 1) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun; 2) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa hingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah.

Isi dari Pasal 359 KUHP kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 1 yang masa hukumannya sudah diperberat. Isi dari rumusan ketentuan pidana Pasal 359 KUHP sebelum adanya perubahan yaitu *“Barangsiapa karena salahnya menyebabkan meninggalnya orang lain, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun atau dengan pidana kurungan selama-lamanya sembilan bulan.”* Adapun unsur-unsur dalam Pasal 359 KUHP yaitu:

⁵ Soesilo.R , *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, h. 245

1. Karena kealpaannya
2. Mati orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat daripada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik *culpa*).

Dalam penelitian ini Penulis mengangkat kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Boulevard, Surabaya. Kasus ini bermula, pada tanggal 11 Mei 2004 pukul 11.00 WIB dimana SatPol PP melakukan pengusuran, yang mengakibatkan adanya korban jiwa yaitu Siti Khoiyaroh balita berumur 4,5 tahun. Saat itu korban dan ibunya sedang berjualan bakso di Jalan Raya Boulevard, Surabaya. Posisi korban didudukkan oleh ibunya diatas gerobak bakso/pentol, kemudian Satpol PP datang dan langsung mengejar serta mengusur para PKL.

Gerobak Ibu korban tertangkap dan petugas menggulingkan gerobak tersebut sehingga korban yang sedang duduk diatas gerobak terjatuh. Kuah panas bakso yang berada dalam gerobak tersebut tumpah dan mengguyur badan korban. Akibat kejadian tersebut, korban dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan, yaitu RSUD Dokter Soetomo, Surabaya. Korban sempat dirawat selama 6 (enam) hari, tetapi akhirnya korban meninggal. Akibat dari kejadian tersebut, Wakil Komandan Pleton Satpol PP Kota Surabaya, Wahyudi, dijatuhi hukuman 5 (lima) bulan 15 (limabelas) hari berdasarkan Pasal 359 KUHP.⁶

Kasus ini telah diputus oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusan No. 1314 K/Pid/2010. Dalam putusan MA menyatakan bahwa Wahyudi melanggar Pasal 359 KUHP. didasarkan putusan MA tersebut diatas, maka penulis mengajukan judul tugas akhir/skripsi, sebagai berikut **Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Karena Kesengajaan Maupun Kealpaan Ditinjau Dari KUHP (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 1314 K/Pid/2010).**

⁶ www.kesimpulan.com/2009/06/pendekatansatpoldanwarganegara-kesimpulan
diunduh pada tanggal 9 Desember 2015

I.2. Rumusan Masalah

Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian merupakan tindak pidana yang harus ditindak dengan tegas, pasal yang tepat, dan sanksi yang sesuai. Atas dasar latar belakang tersebut diatas, Penulis mengemukakan rumusan masalah yaitu “Apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 1314 K/Pid/2010 yang menyatakan terpidana Wahyudi melanggar Pasal 359 KUHP yakni tindak pidana penganiayaan yang didasarkan pada kealpaan, adalah tepat?”

I.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah :

a. Tujuan Akademis

Penelitian ini dibuat untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis

- 1) Untuk memahami dan memperluas wawasan serta memperoleh gambaran tentang vonis hakim yang tepat terhadap Pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian berdasarkan KUHP.
- 2) Untuk memahami dan mengetahui perbedaan mendasar dari penganiayaan berdasarkan dolus dan culpa.

I.4. Metodologi

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

a. Tipe Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah Penulis uraikan maka metodologi yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian kepustakaan dalam rangka memperoleh bahan hukum.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan *Statute Approach*, *Conceptual Approach*, dan *Case Approach*. *Statute Approach* adalah

pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Conceptual Approach* adalah pendekatan dengan menelaah konsep-konsep serta pendapat para ahli mengenai isu hukum yang diangkat dalam skripsi ini.⁷⁸ *Case Approach* adalah dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁹

c. Bahan/Sumber Hukum

Bahan/sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut:

- Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Bahan hukum sekunder, yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena syaratnya menjelaskan bahan hukum primer, antara lain bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan, laporan-laporan, artikel, hasil-hasil seminar, atau pertemuan ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

d. Langkah Penelitian

Penulisan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang didapatkan dengan cara membaca, mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku, literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penulisan ini. Kemudian menginventarisasi bahan-bahan hukum tersebut dan akhirnya disusun secara sistematis. Pembahasan masalah dengan menggunakan metode deduksi yaitu metode yang menggunakan pemikiran yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-

⁷ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Cet ke-6*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 93

⁸ *Ibid*, h. 94

⁹ Ibrahim, Johni, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet III*, Banyumedia, Malang, 2007, h. 306

undangan yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang bersifat khusus yang terjadi, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dikemukakan. Dalam penulisan ini juga akan digunakan 3 macam penafsiran yaitu:

1. Penafsiran Gramatikal yaitu penafsiran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan dan pengertian setempat untuk memperoleh pengertian yang lebih lengkap.
2. Penafsiran Otentik yaitu penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.
3. Penafsiran Sistematis yaitu penafsiran dengan cara melihat (memperhatikan) susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal yang lainnya yang ada didalam undang-undang.

I.5. Pertanggungjawaban Sistematis

BAB I. PENDAHULUAN. Pada bab ini diawali dengan menguraikan latar belakang permasalahan yang dibahas yakni penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang dimana korbannya adalah seorang balita. Anak dalam hal ini merupakan tunas bangsa, namun kehilangan nyawa akibat tindakan penganiayaan oleh seseorang. Dalam bab ini juga menguraikan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian teoritik, metodologi penelitian beserta pertanggungjawaban sistematis yang merupakan gambaran skripsi ini secara umum. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif.

BAB II. Pada bab ini berisi tentang tindak pidana penganiayaan dalam KUHP. Pada bab ini terbagi dalam 2 (dua) sub bab, yakni sub bab 2.1. Pengertian dan Hakekat Tindak Pidana dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana. Selanjutnya, sub bab 2.2. Penganiayaan karena Kealpaan dan Kesengajaan Dalam KUHP.

BAB III. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1314 K/Pid/2010. Pada bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, yakni sub bab 3.1. pada sub bab ini dijelaskan kronologis kasus Siti Khoiyaroh akibat

tindak penganiayaan yang dilakukan Satpol PP. Selanjutnya, sub bab 3.2. mengenai analisis kasus tentang putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1314 K/Pid/2010 terhadap Pelaku Satpol PP yang mengakibatkan kematian Siti Khoiyaroh.

BAB IV. PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban ringkas atas rumusan masalah dan saran yang ditujukan agar pemberian pasal dan sanksi yang diberikan kedepannya dapat sesuai atau setimpal dengan tindak pidananya.